

VGf

Viability Gap Fund

detail

Dalam mendorong pembiayaan infrastruktur melalui APBN sebagai *the last resources*, Pemerintah telah menjalankan beberapa skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Salah satu bentuk skema pembiayaan dalam KPBU adalah melalui dukungan kelayakan (*viability gap fund/VGF*). Viability Gap Fund (VGF) atau dukungan kelayakan atas sebagian biaya konstruksi merupakan dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai pada proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang sudah memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki kelayakan finansial.

VGF diberikan kepada proyek infrastruktur yang dibangun dengan skema KPBU dan bertujuan untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek guna menimbulkan minat dan partisipasi swasta, meningkatkan kepastian pengadaan/lelang proyek infrastruktur sesuai kualitas dan waktu yang ditentukan serta mewujudkan layanan infrastruktur publik dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dengan pemberian dana VGF tersebut, minat swasta untuk berinvestasi akan tumbuh sehingga proyek-proyek KPBU infrastruktur akan banyak terbangun dan dapat melayani kebutuhan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dukungan kelayakan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kelayakan finansial proyek kerjasama
2. Meningkatkan kepastian pengadaan proyek kerja sama dan pengadaan badan usaha pada proyek kerja sama sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan
3. Mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. Dukungan kelayakan dapat diberikan setelah tidak terdapat lagi alternatif lain untuk membuat Proyek Kerja Sama layak secara finansial. Pemberian dukungan kelayakan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/ PMK.011/2012 dan PMK Nomor 143/PMK.011/2013.

Di dalam pelaksanaannya, pemberian VGF ini dialokasikan anggarannya oleh Pemerintah c.q. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sesuai dengan mekanisme APBN dengan memperhatikan beberapa hal yaitu kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan mendasarkan pada prinsip manajemen risiko fiskal yang cermat.

RINCIAN ALOKASI VGF PEMERINTAH UNTUK PROYEK INFRASTRUKTUR KPBU (miliar rupiah)

Tahun	Proyek	Nilai VGF
2018	SPAM Umbulan	654,03
2018	SPAM Bandar Lampung	17,73
Total		671,76

Sumber: Kementerian Keuangan

(sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2018)